

7 TAHUN MELAWAN KORUPSI KISAH SUKSES MASYARAKAT SIPIIL

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

© 2013



7 **TAHUN**
MELAWAN
KORUPSI
KISAH SUKSES
MASYARAKAT
SIPIL

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

**7 Tahun Melawan Korupsi
Kisah Sukses Dari Masyarakat Sipil**

Transparency International Indonesia ©2013

Penulis : Ilham B. Saenong, Retha Dunga (Bagian Youth)
Tata Letak : Gunawan Wibisono

Diterbitkan oleh
Transparency International Indonesia



DANIDA



Pendahuluan

Buku ini merupakan kompilasi kisah-kisah singkat dari program Good Governance and Anti-Corruption. Di dalamnya TI Indonesia bersama-sama dengan berbagai mitra daerah mengembangkan pendekatan antikorupsi yang diinspirasi oleh peran penting penglibatan masyarakat sipil dalam upaya-upaya melawan korupsi. Masyarakat sipil di sini dilihat sebagai aktor utama, baik sebagai penerima manfaat maupun pemicu dan fasilitator bagi berkembangnya sistem antikorupsi di lembaga pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian tercapai manfaat pembangunan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik dan level kemerdekaan warga itu sendiri dalam mengaktualisasikan partisipasi politiknya sehari-hari.

Buku ini bersama program antikorupsi yang diceritakannya, berangkat dari sebuah statemen sederhana bahwa korupsi saat ini telah menjadi sebuah model penyimpangan kekuasaan yang dilakukan secara sistemik dan melawannya harus pula dilakukan secara sistematis dan bersama-sama berbagai elemen kekuatan antikorupsi. Upaya tersebut dimulai experientasinya 7 tahun lalu, dan telah menjadi laboratorium yang hasil-hasilnya telah bisa kita lihat saat ini.

Layaknya sebuah kompilasi, buku ini akan memberi kita sebuah gambaran tentang apa yang dicapai dan proses yang berjalan di Jakarta maupun daerah-daerah kerja. Ia tidak menggantikan laporan program, tidak juga merupakan laporan hasil monitoring dan evaluasi. Lebih tepat dilihat sebagai potret yang lebih hidup dari kerjasama antara warga, pemerintah dan swasta dalam memerangi korupsi.

7

**TAHUN
MELAWAN
KORUPSI**

**KISAH SUKSES DARI
MASYARAKAT SIPIL**

Daftar Isi

- 05.** Pendahuluan

- 09.** **Kata Pengantar TI Indonesia**
 Oleh Natalia Soebagjo – Ketua Dewan Pengurus

- 10.** **Bagian 1**
 Mainstreaming Agenda Antikorupsi
- 11.** Mengenalkan Pakta Integritas
- 13.** Dari Komitmen Pemda ke Implementasi
- 15.** Menggandeng Bisnis Melakukan Collective Action
- 16.** PLN Bersih: No Suap!

- 18** **Bagian 2**
 Kolaborasi Masyarakat Sipil Memperbaiki PBJ
- 19.** Melibatkan Publik
- 21.** Ketika LPI Disegani
- 23.** Mengubah Mindset Aparatur

- 25.** **Bagian 3**
 Public Engagement dalam Monitoring Pembangunan
- 26.** Komite Monitoring Kecamatan
- 28.** Merespons Isu Konkrit Warga
- 30.** Impian Community Center
- 32.** Mewarnai Perencanaan Partisipatif

- 34.** **Bagian 4**
 Kampanye dengan Medium Baru
- 35.** Yang Muda yang Kritis
- 43.** ICT dan Media Kreatif Baru
- 45.** Korupedia.org: Sanksi Baru bagi Koruptor

- 47.** **Penutup**

7 Tahun DANIDA Mendukung Gerakan Antikorupsi

Tanpa terasa hampir delapan tahun sudah Kedutaan Besar Denmark melalui Danish International Development Agency atau Danida memberikan dukungan terhadap program-program Transparency International Indonesia (TII) dalam upaya pemberantasan korupsi. Dukungan yang telah diberikan Danida tersebut telah memberikan hasil yang berarti sebagaimana yang dapat kita lihat dalam buku ini.

Dukungan Danida terhadap Transparency International Indonesia (TII) dimulai pada tahun 2004 melalui program yang bernama Pemantauan Warga Terhadap Pembiayaan Kampanye selama Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2004. Dalam konteks pemilu demokratis pertama yang diadakan di Indonesia, TII melakukan pemantauan pembiayaan politik di 19 Kabupaten/Kota di Indonesia dan menghasilkan sebuah manual untuk pemantauan pembiayaan politik.

Fase kedua dari dukungan Danida diluncurkan pada tahun 2007 yang difokuskan pada pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa melalui Promosi Pakta Integritas di tujuh kabupaten/kota (Bukittinggi, Medan, Tangerang, Jember, Banjarmasin, Bulukumba, dan Lampung).

Fase ketiga (2008 – 2009) dari dukungan Danida terhadap TII difokuskan pada kegiatan-kegiatan kampanye publik dan media yang dikaitkan pada pelaksanaan Pakta Integritas di Makassar, Semarang, Balikpapan, dan Dharmasraya.

Fase keempat (2010 – 2013) atau dukungan Danida yang sedang berjalan saat ini adalah kelanjutan program yang lalu untuk menguatkan Pakta Integritas di Makassar, Semarang, Balikpapan, Dharmasraya, Banjarbaru, dan Pontianak. Meskipun didasarkan atas pengalaman TII dalam pelaksanaan Pakta Integritas sebelumnya, program ini menandai sebuah evolusi dalam strategi intervensi TII. Ini merupakan hasil pembelajaran dari empat tahun pelaksanaan Pakta Integritas yang terintegrasi untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam pelaksanaan program yang lalu, seperti ketergantungan pada pemimpin dan keterbatasan partisipasi masyarakat. Program ini memperkenalkan konsep Audit Sosial dan perencanaan pembangunan secara partisipatif untuk memberdayakan masyarakat lokal dan meman-

faatkan berbagai peluang politik yang dikembangkan melalui pelaksanaan Pakta Integritas untuk mendorong akuntabilitas politik dan meningkatkan kualitas rancangan dan pelaksanaan anggaran daerah. Adaptasi ini sejalan dengan evolusi Transparency International Indonesia, yang memperluas fokus dari reformasi birokrasi menjadi pengorganisasian masyarakat.

Melalui program ini, TII juga memberikan perhatian untuk melibatkan anak muda dengan membentuk SPEAK (Suara Pemuda Anti Korupsi), sebuah forum anak muda melawan korupsi, yang per 24 Oktober 2012 telah memiliki lebih dari 6800 pendukung dari penjurur Indonesia (per 12 Juni 2011 hanya sekitar 2200 pendukung). TII saat ini sedang memfasilitasi forum anak muda ini, terutama dalam mendukung kegiatan kreatif, untuk anak muda, dan peningkatan kapasitas untuk anggota SPEAK.

Selain Pakta Integritas, program yang didukung Danida ini juga telah berupaya mendorong peningkatan iklim bisnis melalui reformasi prosedur perizinan bisnis dan promosi aksi bersama untuk menguatkan Tata Kelola Perusahaan, serta kemudian mengembangkan kapasitas para staf di Sekretariat Nasional TII dan mitra daerah untuk melaksanakan pengembangan organisasi yang dikelola secara berkelanjutan, efektif, dan efisien.

Dukungan DANIDA sangat strategis dalam upaya kita untuk melibatkan masyarakat luas dalam gerakan anti korupsi. Mengandalkan perubahan struktural dan perubahan di kalangan elit kepemimpinan tidaklah cukup tanpa kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memantau sepak terjang penguasa dan dalam memberi masukan positif, maupun kritik kepada mereka. Semua kegiatan yang diceritakan dalam buku sederhana ini adalah wujud dari kepedulian masyarakat sipil.

Sehubungan dengan berbagai dukungan Danida sebagaimana yang telah disebutkan di atas, TII menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap Kedutaan Besar Denmark melalui Danida. Semoga dukungan tersebut dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jakarta, 28 April 2013

Natalia Soebagjo

Ketua Dewan Pengurus

Transparency International Indonesia

Bagian .01

MAINSTREAMING AGENDA ANTIKORUPSI

“Pakta integritas adalah komitmen birokrasi dalam melayani kebutuhan publik secara serius. Bukan politis atau mencari popularitas.”

Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Batang

Mengenalkan Pakta Integritas

Pakta Integritas (PI) merupakan perangkat utama yang digunakan TI di seluruh dunia dalam mencegah kerugian negara atas berbagai sumberdaya akibat korupsi. Inti dari kontrak sosial dalam Pakta Integritas berupa komitmen bersama pemerintah dan pelaku bisnis untuk menghindari korupsi, seperti suap dan perilaku koruptif-kolusif lainnya, dalam memenangkan tender. Komitmen bersama ini sekaligus memberi pengakuan kepada partisipasi publik untuk memantau pengadaan barang/jasa dalam bentuk kehadiran kelompok-kelompok pemantau independen.

Atas dukungan Danida, dan beberapa sumber pendanaan lainnya, Pakta Integritas (PI) saat ini diterima dan dijalankan di tujuh wilayah kerja TI Indonesia. Dimulai dari kabupaten Dharmasraya pada 7 Januari 2008, hingga yang paling mutakhir Kabupaten Batang pada 3 Agustus 2012. Dalam kurun waktu itu, kota Semarang, Banjarbaru, Balikpapan, Makassar dan Pontianak telah pula menekan Pakta Integritas. Upaya-upaya ini mengikuti kesuksesan pelaksanaan percontohan pertama PI di Kota Solok pada (2004) dan yang pertama di lembaga negara KPU Pusat (2008).

Di masing-masing daerah program tersebut, telah terjadi perbaikan dalam hal akses informasi dan transparansi pemerintah daerah. Pemantau independen dan warga kini aktif bekerja melakukan pengawasan dan hasil-hasilnya memperoleh pengakuan yang positif dari pemerintah lokal. Pemerintah kini melakukan sejumlah perbaikan pada sistem pengadaan dan juga pengerjaan proyek yang langsung bersentuhan dengan warga. Pengakuan terhadap keberadaan pemantauan eksternal membuka akses publik kepada dokumen-dokumen pengadaan dan mengikuti proses tender pemerintah se-

“A tool for preventing corruption in public contracting.”

Transparency International

hingga mulai terjadi pula peningkatan *fairness* dalam persaingan usaha yang memotong aksi kolusif maupun pemerasan dalam memperoleh proyek.

Program juga telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan sejumlah regulasi penting terkait mekanisme kelembagaan pengelolaan pengadaan barang jasa yang lebih transparan dan akuntabel. Baik yang berbentuk Peraturan Walikota dan SK-SK pelaksanaan teknisnya, maupun sejumlah draft Peraturan Daerah yang akan segera diusulkan melalui pemerintah untuk dibahas di parlemen lokal. Regulasi inilah yang menjadi payung hukum lembaga seperti LPI, pemantauan pengadaan dan pengelolaan pengadaan.



Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo didampingi Sekjen TII Periode 2009-2012 Teten Masduki menandatangani Pakta Integritas di Kota Batang (2012). Foto dok.TI Indonesia.

Prinsip Pakta Integritas

Dalam setiap pendantangan piagam Pakta Integritas, pemerintah dan pengusaha dengan disaksikan perwakilan masyarakat sipil menyepakati sembilan prinsip dasar, yakni: 1) komitmen antikorupsi dari pemerintah, 2) komitmen antikorupsi dari pihak swasta atau pelaku usaha, 3) komitmen keterbukaan pemerintah dan pihak swasta terhadap partisipasi masyarakat, 4) komitmen atas pemantau independen, 5) adanya mekanisme pengelolaan pengaduan, 6) mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman, 7) mekanisme resolusi konflik, 8) mekanisme perlindungan saksi, dan 9) kesepakatan batasan rahasia.



Walikota Pontianak, Sutarmidji didampingi Sekjen TII periode 2009-2012 Teten Masduki Menandatangani Pakta Integritas di Kota Pontianak Foto Dok TI Indonesia.

Hasilnya berupa mekanisme dan koordinasi antara publik, pemerintah dan pengusaha dalam menyelesaikan konflik dalam pengadaan. LPI secara khusus bekerja mengelola pengaduan atau penyimpangan yang ditemukan warga dan melakukan sejumlah mediasi hingga pelaporan kepada Walikota/Bupati untuk dilakukan koreksi pelaksanaan dan perbaikan kebijakan.

Pakta Integritas telah mendorong pula munculnya SKPD-SKPD yang menjadi pionir pengadaan barang jasa yang transparan dan akuntabel. Dinas-dinas penting yang langsung terkait dengan kepentingan warga seperti dinas Kesehatan, dinas PU dan Dinas Pendidikan membuka diri dan menerima masukan-masukan warga. Baik yang dilakukan melalui audit sosial pemantauan pelaksanaan proyek-proyek, pengalokasian anggaran-anggaran untuk peningkatan kondisi warga, hingga perbaikan pelayanan publik. Diskusi, konsultasi dan pemecahan masalah telah melibatkan warga, pemerintah dan pelaku bisnis dalam berbagai tingkatan. Mulai dari forum-forum warga, forum musrembang, forum konsultasi publik sektoral hingga forum mediasi pengadaan barang jasa.

Proses implementasi PI dan hasil-hasil yang dicapai telah sedikit banyak telah membantu pemerintah men-

jalankan janji dan mandatnya, menghindarkan mereka dari **abuse of power** dan pelanggaran hukum. Bagi pelaku bisnis, ada kepastian usaha dan iklim investasi yang sehat. Sementara bagi rakyat, manfaat pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan berkualitas, yang sebagiannya diperoleh dari partisipasi mereka dalam memperbaiki perencanaan pembangunan dan monitoring pelaksanaannya.



Bupati Solok, Gamawan Fauzi Menandatangani Pakta Integritas di Kota Solok. Foto Dok TI Indonesia.



Workshop Penguatan Landasan Keorganisasian Internal Tim Pengelola Pengaduan Dharmasraya. Foto Dok. TI Indonesia.



Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo melakukan Sidak di SD Depok 1. Foto Dok. TI Indonesia.

Dari Komitmen ke Implementasi

Komitmen antikorupsi selalu bersifat politis, dan hanya akan menjadi barang politis jika tidak disertai tindak lanjut implementasi dalam berbagai bentuknya. Langkah konkrit inilah yang masyarakat gunakan untuk mengukur kesungguhan pemerintah melawan korupsi.

Pemerintah di daerah-daerah kerja TI Indonesia mulai dengan membentuk perangkat pelaksana dan pendukung Pakta Integritas. Di Makassar dan Banjarbaru, Walikota menerbitkan Peraturan Walikota tentang keberadaan keberadaan Lembaga Pemantau Independen. LPI bekerja juga melakukan monitoring, selain menerima dan mengelola pengaduan dari warga untuk diteruskan kepada pemerintah. Bupati Dharmasraya telah mengesahkan Tim Pengelolaan Pengaduan (TPP). Di Pontianak dan Batang kini dipersiapkan pembentukan LPI menyusul daerah-daerah lain yang telah lebih dahulu menjalankan PI.

Langkah lebih maju telah diambil oleh pemerintah kabupaten Dharmasraya dan Batang dengan menyelesaikan rancangan Peraturan Daerah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ranperda partisipatif dan transparency dalam pembangunan telah disosialisasikan dalam sejumlah konsultasi publik sebelum diserahkan kepada pemerintah lokal untuk dibahas bersama DPRD. Kabupaten Batang telah pula menyelesaikan rancangan peraturan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi warga. Bupati meluncurkan "bureaucracy

reform program" yang lebih komprehensif bersama-sama dengan penganggaran pembangunan yang lebih partisipatif. Di dalam kerangka ini LPI bekerjasama pula dengan Unit Layanan Publik yang berisikan tokoh-tokoh dari berbagai kelompok organisasi strategis di Batang. Unit ini bekerja memastikan agenda reformasi berjalan selain memperbaiki kualitas layanan publik di kabupaten ini.

Program antikorupsi tidak akan berhasil jika hanya diusung kepala daerah saja. Penerimaan jajaran SKPD dan unit-unit kerja lainnya menjadi kunci pelaksanaan di lapangan. Meskipun memakan waktu, birokrasi di bawah pemerintah daerah kini sudah membangun keterbukaan dan menerima partisipasi warga. Permintaan data ataupun informasi dari warga mulai dilayani. Dokumen anggaran maupun tender sudah dapat diakses setidaknya oleh mitra program maupun forum komunitas warga. Dalam banyak hal, pelaksana program maupun forum komunitas warga aktif diundang dalam kegiatan konsultasi pemerintah.

Di Semarang dengan mengandalkan kemampuan pendampingan dan jaringan masyarakat sipil yang sudah terbentuk, Pattiro bersama KOMPAKS juga sangat aktif dalam advokasi anggaran. Sejumlah capaian terlihat dari peningkatan alokasi anggaran untuk kaum miskin di sektor kesehatan, infrastruktur maupun pendidikan. Belum lagi pemantauan terhadap berbagai proyek ataupun program pemerintah di kecamatan-kecamatan di mana KMK (Komite Monitoring Kecamatan) terbentuk. Salah satu *highlight* berupa monitoring warga terhadap kasus pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) Umum di Kemijen, sebuah kawasan yang mengalami eskalasi proyek-proyek pembangunan.

Di Makassar dan Banjarbaru LPI telah melakukan pe-



Dengar pendapat LPI Makassar dengan Pemkot Makassar. Foto Dok.TI Indonesia.



Contoh monitoring LPI PBJ. Foto Dok.TI Indonesia.

mantauan dan evaluasi proyek-proyek pemerintah. Pada tahun 2012 kegiatan proyek yang dipantau merupakan skala region (kota) dan yang nilainya di atas 1 miliar. Salah satu *highlight* pemantauan di kota Makassar berupa pengembangan kawasan pantai Losari dengan pagu 29 miliar. Di Banjarbaru, LPI menjalankan pemantauan terhadap 16 proyek sementara Makassar, sebanyak 15 proyek. Hal yang sama juga berlanjut di Balikpapan seiring terbentuknya tim monitoring pembangunan yang akan merampungkan pengawasan 6 proyek pada tahun ini sambil mengadvokasi penganggaran partisipatif.

Mengajak Bisnis Melakukan Collective Action

Manfaat penerapan PI dalam dunia bisnis sangat besar. Baik demi efisiensi maupun perbaikan iklim usaha. Dalam beberapa kasus juga menguntungkan publik sebagai konsumen akhir dari sebuah produk. Di Ekuador, misalnya, Pakta Integritas dalam industri telekomunikasi telah menekan harga layanan mobile telecommunication hingga 25%. Dalam project konstruksi baja bernilai \$62.5 miliar di Pakistan, pemerintah setempat berhasil menekan angka pengadaan di

bawah estimasi semula. Saat ini TI Indonesia menjalin kerjasama dengan PLN guna memperbaiki proses pengadaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

PLN merupakan perusahaan listrik terbesar di Indonesia yang pada 2012 menguasai 76% pasar listrik nasional. Dengan besaran semacam ini, PLN memiliki vendor yang sangat banyak dan juga besar. Potensi ini menjadikan kerjasama dengan PLN sangat strategis untuk menga-

jak kelompok-kelompok perusahaan bisnis terkait untuk melakukan langkah konkrit melawan korupsi.

Dengan fokus pada pengadaan dan pelayanan konsumen, PLN dan TII membangun *collective action* di kalangan pengusaha kelistrikan. Strategi ini berupa mengikat para vendor untuk tidak melakukan suap untuk memperoleh tender. Sebaliknya perusahaan yang bersaing dapat menunjukkan kredibilitasnya secara keuangan, sumberdaya dan sebagai

“...(Pakta Integritas) ini bertujuan memastikan bahwa PLN benar-benar menjalankan praktik anti korupsi dalam menjalankan usahanya menyediakan listrik bagi masyarakat luas.”

Nur Pamudji, Dirut PLN

produsen barang. Atas dasar kualifikasi ini, tidak dimungkinkan ada perusahaan bodong ataupun boneka yang bisa disetir oleh kekuatan politik yang memperoleh tender atas dasar pemerasan atau rekayasa lainnya.

Komitmen PLN Bersih yang muncul dari dalam, juga memperoleh momentum yang tepat karena sekitar 67 (enam puluh tujuh) persen responden dalam survey vendor menilai telah terdapat komitmen perusahaan mitra PLN untuk melakukan bisnis tanpa suap. Sekitar 71 (tujuh puluh satu) persen responden menilai telah terdapat komitmen perusahaan mitra PLN untuk melakukan bisnis secara fair dan transparan. Dan sekitar 54 (lima empat) persen responden menilai perusahaan mitra PLN telah memiliki kebijakan dan program antisuap.

Dengan demikian ada kesempatan besar untuk mengubah agenda antikorupsi sebagai upaya individual di PLN menjadi upaya bersama yang memiliki dampak

sistemik yang lebih baik. Selain itu, bukan saja efisiensi dan kebocoran dapat dihindari, tapi juga berdampak pada perbaikan usaha dan pengadaan di Indonesia.



Dirut PLN Nur Pamudji beserta Ketua Dewan Pengurus TI Indonesia Natalia Soebagjo menandatangani MOU PLN dan TII. Foto Dok. PLN



Meeting penandatanganan MOU TII dan PLN. Foto Dok. TI Indonesia.

Nur Pamudji, CEO PLN pernah terhenyak melihat rumitnya pengadaan di BUMN tempatnya bekerja. Bayangkan saja, waktu masih menjabat sebagai GM Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa-Bali itu, beliau harus berurusan dengan vendor-vendor kecil (baca eceran) yang ujung-ujungnya mengambil barang dari satu atau dua distributor juga. PLN sebagai perusahaan besar, misalnya membeli trafo puluhan milyar rupiah dari perusahaan yang beralamat di ruko-ruko.

Mulai dari tahun 2009 itulah PLN merintis pembelian kepada pemasok, dan kalau perlu langsung ke pabrik. Bukan cuma itu, masih banyak yang bisa lebih diefisienkan dengan hasil yang tak kalah berkualitasnya. Belakangan, pemeliharaan turbin ternyata bisa dilakukan oleh GMF AeroAsia (anak perusahaan Garuda) yang punya kredibilitas tinggi, melalui mekanisme kerjasama antara BUMN. Prosedurnya tidak lagi rumit, namun memberi hasil optimal.

Pengalaman inilah yang mendorong PLN bekerjasama dengan TI Indonesia untuk memperbaiki sistem pengadaan dan pelayanan publik. Dengan harapan ada strategi mendorong pengadaan yang bersih, persaingan usaha yang sehat dan pada gilirannya mengurangi biaya-biaya tinggi.

PLN Bersih: No Suap!

Inisiatif Melawan Korupsi



Foto bersama saat deklarasi "PLN Bersih: No Suap!". Foto Dok. PLN.

Merujuk pada Undang-Undang ketenagalistrikan, PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kewenangan monopoli untuk memasok kebutuhan listrik nasional. PLN bergerak di sektor bisnis yang memiliki risiko korupsi sangat tinggi. Sektor ketenagalistrikan yang terkait dengan sektor pembangkitan energi menempati posisi keenam dari 19 sektor yang aktif membayar suap ketika melakukan bisnis di luar negeri (Bribe Payers Index, 2011). PLN bergerak di Negara yang memiliki prevalensi korupsi yang sangat tinggi. Indonesia menempati peringkat 118 dari 176 negara (Corruption Perception Index, 2012). Dalam hal pengadaan, PLN memiliki pengalaman yang kurang baik, terkait dengan praktik korupsi yang melibatkan mantan direktur utama Edi Widiono. Sementara dalam hal pelayanan publik, kemudahan mendapatkan sambungan listrik masih menempati peringkat 145 dari 186 negara sehingga memiliki kontribusi yang erat terhadap masalah kemudahan berusaha di Indonesia. Dalam hal sumber daya manusia, KPK menempatkan PLN sebagai salah satu dari 15 insititusi yang memiliki level integritas yang rendah (Laporan Tahunan KPK, 2009).

Berdasarkan latar belakang tersebut tersebut PLN difasilitasi oleh Transparency International Indonesia

mengimplementasikan program *Good Corporate Governance* dan Anti Korupsi sejak 6 Maret 2012. Fokus kerja sama diarahkan pada sektor pengadaan, pelayanan publik. Inisiasi program ini dilakukan dengan kampanye di kalangan manajemen PLN tentang pentingnya praktik integritas dalam bisnis. Kampanye yang mengambil tagline PLN Bersih: No Suap! dilakukan secara serentak dan menyebar dari kantor pusat, unit, dan anak perusahaan.

Kampanye penyadaran yang bertajuk PLN Bersih: No Suap! yang semula merupakan komitmen terbatas PLN telah berhasil menjadi komitmen bersama. Nur Pamudji, direktur utama PLN, bersama dengan 35 vendor mendeklarasikan janji integritas untuk menerapkan praktik integritas dalam proses bisnisnya. Komitmen bersama antara PLN dan para vendor ini ditandai dengan deklarasi PLN Bersih untuk menciptakan bisnis ketenagalistrikan yang bersih, tanpa suap.

Di level regulasi, saat ini TII sedang memfasilitasi PLN untuk melakukan revisi terhadap regulasi pengadaan internal PLN yang melibatkan pakar pengadaan internasional yang berada dalam jaringan Transparency

International. Revisi regulasi internal di PLN, bersama dengan beberapa instrumen anti korupsi (*whistle blowing system*, *anti-fraud management*, desain pelayanan informasi publik, dan *complaint handling mechanism*) juga sedang di kembangkan. Sejalan dengan perubahan system pengadaan di PLN, TII bersama PLN mengembangkan sebuah model perubahan institusional dalam konteks *agent of change*. Pengembangan silabus dan penyelenggaraan serial workshop dilakukan untuk mengiringi perubahan sistem yang sedang terjadi dengan perubahan budaya. Dengan kombinasi perubahan system dan budaya diharapkan reformasi yang sedang berjalan dapat berjalan berkelanjutan.



Direktur Dikyanmas KPK Dedie A. Rachim, Direktur PLN Nur Pamudji dan Ketua Dewan Pengurus TI Indonesia Natalia Soebagjo berfoto bersama. Foto Dok. PLN.



Direktur PLN Nur Pamudji menandatangani Deklarasi PLN Bersih: No Suap!. Foto Dok. TI Indonesia.

KOLABORASI MASYARAKAT SIPIL MEMPERBAIKI PBJ

“Keberadaan LPI patut mendapatkan apresiasi, karena merupakan komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Lembaga ini bisa merubah stigma negatif yang sudah melekat (pada birokrasi).”

Ilham Arief Sirajuddin, Walikota Makassar

“Perubahan kebijakan di level atas saja tidak menghasilkan manfaat bagi publik tanpa capacity building masyarakat untuk mendorong dan mengontrolnya.”

Ary Nugroho, Pattiro Semarang

Melibatkan Publik

Pengelibatan publik dalam pelaksanaan program antikorupsi merupakan prasyarat utama. Tanpa keterlibatan publik, pemerintah dan bisnis tidak akan pernah sungguh-sungguh menjalankan agenda-agenda reformasi kelembagaan dan keterbukaan. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng kekuatan-kekuatan masyarakat sipil di daerah. Mulai dari NGO-NGO yang memiliki perhatian terhadap agenda reformasi, inisiasi kelompok-kelompok independen, hingga pengembangan dan penguatan kelompok-kelompok basis yang ada di tingkatan warga.

Pattiro Semarang di Kota Semarang, STABIL di Balikpapan, Bastari di Banjarbaru, Gemawan di Pontianak dan Omah Tani merupakan mitra-mitra TII dalam menjalankan program di daerah. Mereka pada umumnya telah lama bekerja dan memiliki reputasi yang baik di tingkat warga dan pemerintahan. Sehingga memudahkan dalam bekerja pada aras pemberdayaan dan pemantauan masyarakat, sekaligus dalam aras kerjasama kelembagaan dengan pemerintah. Mitra-mitra lokal ini juga telah mengembangkan berbagai inisiatif sejenis. Misal Pattiro Semarang, Stabil Balikpapan dan Gemawan Pontianak telah terlibat dalam perencanaan partisipa-

tif dan advokasi pelayanan publik selama beberapa tahun belakangan. Demikian pula dengan Omah Tani dan Bastari Kalsel telah lama mengembangkan upaya-upaya pengorganisasian warga dan monitoring pembangunan di sektor-sektor yang dekat kehidupan warga setempat seperti tani dan industri maupun kehutanan.

Sementara itu, di tempat-tempat di mana TI Indonesia memiliki kantor daerah yang telah terbentuk sebelumnya seperti di Dharmasraya dan Makasar, kantor daerah inilah yang bekerja menjalankan program dengan tetap menggandeng pula lembaga-lembaga lokal ke dalam berbagai kegiatan program. Salah satunya NGO-NGO lokal diwadahi dalam kelompok kerja (pokja) pemantauan yang bekerja melakukan pemantauan maupun pembahasan hasil-hasil temuan warga. Selain itu, ada keterwakilan NGO lokal dalam

intah, beranggotakan unsur-unsur masyarakat termasuk perwakilan NGO di dalamnya. Lembaga ini juga menerima dan memproses pengaduan dari masyarakat terkait pengadaan barang jasa publik. Sementara itu KMK merupakan wadah kelompok warga basis yang perhatian terhadap persoalan publik di sekitarnya. Terdiri dari perwakilan-perwakilan warga dari berbagai kelurahan maupun kecamatan yang menjalankan pemanauan maupun menerima informasi dan pengaduan warga. KMK aktif mengawasi kegiatan pengadaan di sekitarnya, sekaligus menerima aduan warga meskipun tidak berwenang memprosesnya. Mereka cukup membantu warga mengisi form pengaduan beserta bukti-bukti dan kemudian menindaklanjuti kepada LPI.

Melibatkan publik dan mengorganisir mereka dalam pola kerjasama baru dan kelompok-kelompok baru



Forum Klarifikasi masyarakat Kemijen bersama pemerintah kelurahan Kemijen (28/10/2011). Foto dok. TI Indonesia.

Lembaga Pemantau Independen (LPI) yang dibentuk pemerintah daerah setempat.

LPI dan Komite Monitoring Kecamatan (KMK) merupakan upaya konkrit penglibatan warga dalam proses pemantauan. LPI dibentuk untuk melakukan pemantauan langsung terhadap proyek-proyek pemer-

tidaklah mudah. Mereka pada umumnya memang terbiasa bersuara kritis dalam berbagai bentuknya, namun program ini berhubungan dengan kerja-kerja konkrit dengan capaian-capaian yang terukur. Tidak cukup hanya mengatakan ada yang tidak beres atau tidak benar dalam pemerintahan, tapi harus menunjukkan dimana letak ketidakberesan itu,



LPI Banjarbaru mengadakan pemantauan dana BOS (09/03/2012).



LPI Banjarbaru mengadakan pemantauan alat peraga dan TIK dana DAK (09/13/2012).

misalnya di pengadaan, dan apa bukti-buktinya. Itulah yang kemudian diproses, dikonfrontasi dan dicarikan jalan keluar.

Untuk mencari figur-figur yang mau bekerja secara konkrit, Program Pakta Integritas yang dijalankan TI Indonesia atas dukungan DANIDA memulai dengan berupaya menciptakan kebutuhan dari masyarakat sipil terhadap keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dalam sektor pengadaan barang jasa. Cara terbaik dengan mendekatkan isu-isu pengadaan dengan publik. Misalnya warga diajak memikirkan pengadaan di sekitarnya: pengadaan sarana belajar dan pembangunan fisik di sekolah, pemberian makanan bagi warga gizi buruk, hingga pembangunan dan jalan-jalan kecil di ling-

Cara lain dengan menghubungkan program pemantauan dengan alokasi anggaran bagi warga maupun pelayanan publik. Misal saja dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), warga dilibatkan untuk memikirkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan taraf ekonomi, kesehatan, dan pendidikan warga. Seperti peningkatan anggaran untuk jaminan kesehatan warga miskin, anggaran rehabilitasi dan pendampingan warga korban KDRT, bisa pula pemberian skill, kesempatan usaha dan dukungan modal. Perubahan kebutuhan warga yang lebih berorientasi sosial ekonomi menyebabkan murembang tidak lagi didominasi dengan usulan-usulan yang berorientasi sarana fisik. Yang hanya membatasi kebutuhan anggaran seputar sarana jalan, selokan dan semacamnya.



Workshop Review Progres monitoring KMK se-kota Banjarbaru (11/11/2012). Foto Dok. TI Indonesia.

Penglibatan lain dengan membuat warga ikut terlibat dalam isu-isu kedaerahan yang dekat dengan pelayanan publik. Baik itu mendampingi maupun menjadikan mereka pendamping dalam kasus-kasus pelayanan kesehatan, pendidikan dan sejenisnya, maupun dalam advokasi regulasi yang menjamin pelayanan publik yang lebih baik. Di Semarang misalnya, advokasi layanan kesehatan berupa cuci darah dan jamkesmas aktif dilakukan. Begitu pula kesempatan berusaha bagi PKL telah menjadi wilayah advokasi dari warga yang tergabung dalam KMK. Di Makassar, advokasi pendidikan dan Jaminian Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) juga dijalankan secara konsisten.

kungan mereka. Baik-buruknya pengadaan tersebut dapat dirasakan langsung oleh warga. Entah itu karena tidak adil, tidak dilaksanakan ataupun jumlah dan kualitasnya jauh dari harapan warga.

KETIKA LPI DISEGANI



Pelantikan Komisioner LPI Makassar. Foto Dok. TI Indonesia.

Bahaya janji-janji reformasi ketika ia menjadi alat pencitraan. Sementara komitmen seorang pimpinan reformis hanya akan menjadi alat politik jika tidak mampu menggerakkan birokrasi untuk mewujudkannya.

Kondisi ini selalu membayangi program-program reformasi manapun, termasuk penerapan Pakta Integritas. Pembentukan Lembaga Pemantau Independen (LPI) merupakan tindakan konkrit mengukur komitmen Pakta Integritas seorang kepala daerah. Karena itu LPI dibentuk untuk memastikan penyelenggaraan pengadaan pemerintah secara adil, transparan, dan akuntabel. Bersamaan dengan itu LPI juga mendorong partisipasi warga dan memastikan masyarakat memperoleh hasil pengadaan yang berkualitas.

Melalui seleksi yang ketat, Kota Makassar berhasil memilih 5 komisioner atas dasar Peraturan Walikota (Perwali) No. 21, 2010. Pada tahun 2011 LPI mulai aktif bekerja. Hanya dalam dua tahun LPI telah memperoleh pengakuan dari sejumlah SKPD. Pengakuan ini mulai dari terbukanya akses dokumen pengadaan bagi LPI hingga diposisikannya LPI sebagai mitra kerja pemerintah.

Di Makassar misalnya sudah ada SKPD yang memberi akses seluas-luasnya bagi LPI untuk memperoleh data dan informasi terkait pengadaan. Padahal sebelumnya, jangankan dokumen tender, untuk memperoleh dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) saja sulitnya bukan main. Pada awal-awal bekerja, LPI membutuhkan waktu yang lama dan jalur berliku untuk dapat memperoleh dokumen-dokumen tersebut.

Kini LPI dipercaya pula menjadi mitra diskusi persoalan-persoalan pelelangan oleh SKPD. Dinas PU misalnya aktif melakukan konsultasi dengan LPI atas problem pengadaan di instansi mereka. Hasilnya, LPI ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan pengadaan yang baru yang mendorong sistem pengadaan yang lebih baik.



LPI Makassar mengadakan konferensi pers menyikapi temuan

Ambil contoh kebijakan soal pemaketan pekerjaan. Tahun sebelumnya penggabungan pekerjaan masih jamak terjadi. Proyek pembangunan jalan beton, misalnya, sengaja digabung dengan jalan aspal. Modus ini jelas akan melahirkan persaingan tidak sehat. Pengusaha tertentu yang memiliki kualifikasi teknis mengerjakan jalan aspal akan mengambil untung, dan menyingkirkan kontraktor lain yang hanya mengantongi kualifikasi mengerjakan jalan beton.

Secara konkrit, LPI memantau proyek yang besar untuk memastikan transparan atau tidak, juga terjadi persain-



Pemerintah menyikapi temuan

Setelah bekerja setahun, tibalah saat Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ) Kota Makassar mempertanggungjawabkan mandat yang di jalankan. Akhir tahun lalu, bertempat di kantor mereka di Jl. Nikel Makassar, LPI menggandeng Ilham Arief Sirajuddin, sang Walikota untuk ikut mendengar hasil-hasil peninjauan daftar simak proses pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah kota serta hasil-hasil pemantau komite monitoring kecamatan.

Temuan LPI ternyata masih banyak pengadaan di sejumlah SKPD yang belum sepenuhnya sejalan dengan Perpres 54 tahun 2010 dan masih banyak PPK yang tidak bersertifikasi.

“Juga sekitar 60 persen Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan pelelangan secara manual atau belum menggunakan media elektronik” kata ketua LPI-PBJ, Alim Israk.

Sementara itu Ilham menyatakan keberadaan LPI-PBJ merupakan komitmen dalam upaya pemberantasan tindak korupsi, selain itu lembaga ini diharapkannya dapat merubah stigma korupsi yang melekat di Kota Makassar.

Sang Walikota menyambut positif hasil temuan LPI. Atas dasar itu pula Walikota kemudian menyampaikan ke jajarannya untuk memperbaiki kinerja dan menjalankan pengadaran sesuai aturan yang terbaru.

gan sehat dalam pengadaan dst. Mereka rutin membuat evaluasi atas proyek-proyek pemerintah yang mereka pantau. Pada tahun 2012, LPI memantau 15 proyek, sementara tahun sebelumnya sebanyak 7 proyek. LPI memprioritaskan pemantauan pada proyek-proyek di atas 1 miliar. Salah satunya pada tahun ini revitalisasi pantai Losari senilai 29 miliar.

Prestasi lain dalam hal kebijakan pengadaan, LPI berhasil mendorong Dinas PU untuk menambah masa pemeliharaan pekerjaan. Masa pemeliharaan selama 6 bulan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Presiden No. 54 ditingkatkan menjadi satu tahun. Dengan demikian, kontraktor terpicu menjaga kualitas pekerjaan untuk menghindari risiko kerusakan yang harus dipertanggungjawabkan selama satu tahun pasca serah terima. Upaya ini menjadi contoh bagi SKPD lainnya.

Seiring makin aktifnya pengawasan oleh LPI, mulai berdatangan tawaran-tawaran dari rekanan pelaksana project di lapangan maupun oknum-oknum dinas-dinas ketika mereka melakukan pemantauan. Penawaran-penawaran itu bisa secara sangat halus seperti ingin membantu prabotan, memberi pinjaman atau uang *cash*.

Dalam situasi ini, LPI membangun mekanisme keterbukaan internal untuk menjaga integritas dan kredibilitasnya. Setiap kembali dari melakukan pemantauan, masing-masing komisioner melakukan sharing atas temuan dan kondisi pemantauan. Sebaliknya, LPI juga mencoba memahamkan kepada para pihak yang mencoba menawarkan suatu itu bahwa upaya-upaya semacam ini yang akan membuat kultur penyelenggaraan negara menjadi buruk.

Mengubah Mindset Aparatur

Pengadaan barang dan jasa adalah lahan basah bagi birokrasi. Di sana pula korupsi terbesar terjadi di negeri ini. Sebuah studi Bank Dunia memperkirakan kebocoran uang negara dari sektor ini mencapai 40% dari keseluruhan proyek. Godaan untuk melakukan tindak korupsi rupanya belum tunduk kepada rasa takut akan risikonya.

Pakta Integritas sebagai sebuah program pencegahan korupsi merespons pentingnya mengubah mindset pemerintah. Untuk itu upaya-upaya kampanye antikorupsi kepada birokrasi dan mekanisme pencegahan korupsi yang dikembangkan di wilayah kerja kemudian diarahkan pada suatu titik untuk membuat korupsi sebagai perbuatan yang jauh lebih berisiko daripada keuntungannya.

Para pelaku program yang terdiri dari LPI, mitra kerja maupun perwakilan TI Indonesia aktif meyakinkan birokrasi untuk menyadari bahaya pengadaan yang tertutup dan tidak akuntabel. Yang tidak saja korupsi di dalamnya akan merugikan publik sebagai penerima manfaat pembangunan, tapi juga berpotensi menjerat pelakunya secara hukum saat upaya-upaya pengawasan semakin lebih baik.

Visioning tentang mekanisme baru pengadaan yang bisa membebaskan mereka dari potensi jerat hukum cukup efektif bagi perubahan cara pandang birokrasi. Meskipun tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas telah berdentung selama ini, tapi tidak cukup contoh konkrit yang bisa mereka adopsi.

Program PI telah mendorong pemerintah untuk lebih terbuka kepada publik dalam pengadaan, menjalankan lelang sesuai aturan, serta mengefektifkan pengawasan secara internal. Dinas-dinas lambat laun terbuka dan menaruh kepercayaan kepada LPI. Mereka mulai memberikan dokumen-dokumen anggaran, lelang dan sebagainya.

“Sebelumnya kita larut pada kebiasaan yang kadang aturannya sudah berubah... Lebih baik dicegah sebelum berkembang menjadi masalah lebih lebih besar.”

**Muhammad Anshar, Kepala Dinas
PU Kota Makassar**



Rapat koordinasi LPI Makassar dengan jajaran Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar. Foto Dok. TI Indonesia.

Membumikan Agenda Antikorupsi

Mendekati pukul 2 siang, lima anggota LPI kota Makassar merapat ke kantor dinas PU. Siang itu mereka akan melakukan rapat koordinasi dengan jajaran PU yang menangani soal infrastruktur air. Hadir pula para rekanan kontraktor maupun konsultan.

Salah seorang komisioner LPI, demikian mereka lebih akrab disebut, mengatakan bahwa LPI sebentar lagi akan memberi ceramah tentang pengadaan barang/jasa yang benar. Sekaligus memaparkan hasil uji pantau mereka terhadap project-project yang ditangani PU tahun sebelumnya.

Benar saja, ruangan yang dihadiri sekitar 20 rekanan dan staf PU berubah menjadi forum pengarahan dari LPI. Bukan itu saja, anggota-anggota LPI

juga silih berganti seperti mengevaluasi proses PBJ di lapangan. Jelang akhir pertemuan, barulah ada sesi tanya jawab sehingga pemerintah dan rekanan mereka juga bisa berkonsultasi bagaimana sebaiknya PBJ dijalankan.

Dua tahun lalu, forum semacam ini hanyalah mimpi di siang bolong. Jangankan menceramahi birokrasi. Mencari informasi saja dipersulit. Berbekal kerja-kerja konkrit LPI dan kemampuan mereka memberi konsultasi pengadaan, tumbuh pula penerimaan SKPD. Tidak lagi sekadar melihat Perwali kota Makassar, tapi penerimaan tersebut muncul atas kebutuhan dari birokrasi sendiri untuk menjadi lebih baik.[]

Bagian .03

PUBLIC ENGAGEMENT DALAM MONITORING PEMBANGUNAN

“LPI harus menjadi garda terdepan pengawasan: bersuara, memantau, melakukan publikasi serta mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan.”

Albertus George, Komisioner LPI Kota Makassar

Komite Monitoring Berbasis Warga

LPI tidak dapat bekerja sendiri. Faktanya tidak ada satupun gerakan antikorupsi yang berhasil dan berkelanjutan tanpa melibatkan dukungan warga. Di Indonesia, mitra program dan LPI dalam bekerja membentuk Komite Monitoring Kecamatan (KMK). Kelompok masyarakat yang diharapkan menjadi pelopor memantau proyek di sekitarnya. Selain itu, mereka juga aktif mendiskusikan isu-isu konkrit warga, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam beberapa kasus, mereka juga melakukan pendampingan agar warga memperoleh hak-haknya terkait pelayanan publik.

KMK, berbeda dengan LPI yang berada pada tingkat kabupaten/kota, berada pada level masyarakat *grassroot*. KMK karena itu tidak memantau proyek besar, mereka memantau hal-hal yang terkait langsung dengan kehidupan warga. Seperti pemantauan pembangunan MCK, dana rehabilitasi sekolah, pemberian makanan tambahan untuk warga gizi buruk dan sebagainya. Meskipun terlihat sederhana, KMK memberi contoh konkrit kepada warga bahwa mereka berhak menyatakan aspirasi dan keluhan mereka bisa didengar.

Sebagai contoh, di kota Banjar Baru, KMK memonitor 3 proyek di setiap distrik, sementara LPI menargetkan 16 kerja monitoring proyek. Sementara itu di Makassar, dari 15 program monitoring 4 di antaranya kegiatan monitoring yang dilakukan sendiri oleh warga di setiap distrik.

Pelaku program tidak membentuk KMK dari nol. Tapi menggunakan strategi penguatan kelompok-kelompok basis yang sudah ada selama ini. Di Semarang, misalnya, Pattiro Semarang selaku mitra pelaksana program menggandeng kelompok PKK di Candi hingga kelompok kritis warga di Kemijen. Di Makassar, LPI bekerjasama dengan KMK yang terdiri dari relawan kelompok kaum miskin kota. Banyak di antara anggota KMK yang bergabung telah memiliki pengalaman dalam advokasi sehingga mempermudah kerja-kerja di lapangan.



Pertemuan rutin warga Kemijen kota Semarang. Foto Dok.TI Indonesia

4 Fungsi Utama Mitra Lokal terhadap Warga :

1. Akses data/info publik
2. Penguatan kapasitas
3. Konsultasi dan pendampingan
4. Dukungan dana operasional kegiatan

Kisah Si Plat Dekker



Foto Dokumentasi TI Indonesia



Foto Dokumentasi TI Indonesia

Syarief, yang sehari-hari menjadi supir mobil barang, merupakan salah satu anggota KMK di Makassar. Rasa jengkel terhadap ketidakadilan maupun segala ketidakberesan di sekitarnya membuatnya aktif dalam berbagai demonstrasi maupun advokasi. Perkenalannya dengan LPI mengantarnya terlibat dalam KMK yang menurutnya menawarkan kegiatan konkrit dalam memperbaiki keadaan warga.

Tahun lalu, ia melaporkan aduan warga di Beringin Timur, RW 10 kelurahan Kassi Kassi Rappocini terkait tidak diselesaikannya pembangunan “plat dekker” (jembatan kecil untuk saluran air) saat pembangunan jalan di lingkungan mereka.

Awalnya warga merasakan kejanggalan tidak dibangunnya plat Dekker yang dibutuhkan untuk mencegah aliran air terhambat. Selama ini ketiadaan saluran telah menimbulkan masalah sanitasi di lingkungan sekitar.

Syarief mengupayakan agar memperoleh gambar dan dokumen kontrak. Melalui RT, warga memperoleh gambar dan melakukan kajian. Terlihat jelas bahwa kontraktor tidak membangun 1 dekker di satu titik dari 2 yang direncanakan.

“Gambar merupakan acuan kontraktor dalam bekerja. Gambar dulu baru dihitung nilainya. Tidak mungkin ada item dalam gambar yang tidak ada biayanya,” ungkap Syarief yang pernah menjadi tukang bangunan. Ia merasakan ada yang di korupsi.

Atas aduan KMK ini, LPI segera memberitahukan kasus ini kepada PU sebagai pemilik proyek. LPI kemudian mempertemukan warga dengan PU dan kontraktor. Dalam mediasi tersebut, PU bersedia membangun dekker dimaksud dan meminta kontraktor pelaksana untuk merampungkannya.

Merespon Isu Kongkrit Warga

Membangunkan kepedulian warga terhadap persoalan-persoalan pembangunan di sekitar bukan pekerjaan mudah. *Mindset* bahwa pembangunan merupakan tanggungjawab pemerintah di satu sisi, dan warga tidak punya keahlian ataupun hak didalamnya membuat proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan hanya berputar pada orang-orang tertentu saja. Melibatkan warga membutuhkan strategi pengorganisasian yang tepat, yang dapat mendekatkan warga dengan isu-isu pembangunan.

Dalam menjalankan program antikorupsi yang terwujud dalam kegiatan monitoring pembangunan oleh warga, TI Indonesia dan mitra-mitra lokal tidak hanya mensosialisasikan pentingnya peran serta warga dalam pemantauan PBJ. Juga tidak cukup hanya menjalankan kegiatan-kegiatan pemantauan seperti pembangunan rehabilitasi sekolah, MCK dan pembuatan *paving block*. Warga juga didampingi dalam urusan-urusan pelayanan publik yang angkat dibutuhkan warga.

Warga yang telah memperoleh sosialisasi tentang *citizenship (kewarganegaraan)*, menjadi lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya. Baik yang terkait dengan pelayanan publik maupun pemantauan pembangunan. Khususnya dalam hal pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar warga, telah muncul perhatian yang kuat terhadap kaum miskin dalam bentuk monitoring berkala terhadap pemberian raskin. Juga pendampingan dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) demi memperoleh layanan kesehatan cuma-cuma. Hingga membantu klarifikasi ketidakjelasan dalam penerimaan siswa baru, pemberian kesempatan kursus dan kerja dari Dinas Tenaga Kerja, dan semacamnya.

Langkah-langkah konkrit merespons kebutuhan dasar masyarakat membangun kedekatan program dengan warga. Warga merasa bahwa program menjadi bagian dari hidup mereka karena program sangat membantu dan bersentuhan langsung dengan isu-isu di tingkat basis. Sebaliknya upaya dan keberhasilan dalam merespons isu konkrit warga mempromosikan pentingnya keberadaan program di lingkungan mereka. Hasilnya partisipasi warga semakin tinggi dan semakin banyak persoalan-persoalan yang diangkat dan bisa dipecahkan.

Srikandi dari Candi



Foto Dokumentasi TI Indonesia |

Kelompok-kelompok perempuan sangat aktif terlibat dalam kegiatan program di Semarang. Dimotori oleh ibu-ibu PKK, Komunitas Candi kini mencakup 9 RW di kelurahan Candi, setelah sebelumnya hanya 3 RW pada awal-awal berdirinya.

Antusiasme warga, khususnya kalangan ibu-ibu sangat erat kaitannya dengan keberadaan peran *Community Center* di Candi yang sangat peduli dengan kebutuhan dasar mereka. Baik itu dalam hal layanan pendidikan, pekerjaan maupun kesehatan.

Ibu Istiqomah misalnya, tidak ragu-ragu mendampingi seorang pasien gagal ginjal untuk memperoleh perawatan medis secara berkala. Awalnya sang pasien harus mengeluarkan duit sendiri hingga akhirnya tidak mampu lagi. Sang Ibu setelah mengetahui situasi ini,

memberi informasi yang ia ketahui dari sosialisasi dan diskusi di *Community Center*-nya. Ia lalu mendampingi ke Dinas Kesehatan untuk pengurusan SKTM dan Jamkesmas layanan cuci darah.

Pendampingan ini tidak berlangsung mulus. Petugas mempersulit dengan berbagai alasan sehingga permohonan pasien ditolak. Tidak mau kehilangan akal, Istiqomah lalu mengontak Pattiro Semarang untuk akses informasi dan pendampingan lebih jauh. Mereka kemudian bersama-sama mendiskusikan hal-hal yang menjadi hambatan untuk pengurusan pasien cuci darah. Akhirnya Dinas Kesehatan menyetujui pemberian layanan cuci darah gratis untuk pasien dampingan Ibu Istiqomah.

Impian Community Center

“Akses data sangat penting. Agar informasi-informasi langsung sampai ke masyarakat, tidak dimonopoli oleh orang-orang tertentu saja”.

Bob, Anggota Komunitas Candi

Selain mengembangkan model KMK untuk pemantauan pembangunan, TII bersama mitra kerjanya di Kota Semarang yaitu Pattiro Semarang, juga mengembangkan model *Community Center* yang merupakan wadah atau forum warga untuk berkumpul dan berdiskusi terkait dengan isu-isu pembangunan dan pelayanan publik.

Community Center juga merupakan suatu forum gerakan bersama dari komunitas dalam menghadapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan isu-isu pembangunan dan pelayanan publik, terutama di wilayah komunitas mereka masing-masing.

Keberadaan *Community Center* telah membuat warga memiliki ruang untuk bertanya dan memperoleh informasi yang jelas terhadap pembangunan. Umumnya warga membutuhkan kejelasan tentang kegiatan-kegiatan apa yang akan dijalankan pemerintah kota di wilayah mereka. Dengan demikian misalnya mereka mengetahui berapa jatah raskin, siapa-siapa saja yang berhak memperoleh dan bagaimana cara memperolehnya. Demikian pula terkait dengan aturan-aturan dalam penerimaan siswa baru, prosedur yang harus ditempuh dan sebagainya.

Berbekal informasi yang valid, warga dengan sendirinya terdorong untuk memperjuangkan kepentingannya. Pada saat yang sama mereka melakukan pemantauan apakah kegiatan-kegiatan pemerintah sudah dijalankan dengan benar ataukah terjadi penyimpangan. Tidak jarang, warga melihat keganjilan di sana-sini. Misal saja sebuah sekolah menengah yang telah menerima alokasi dana BOS menarik uang penyelenggaraan pendidikan. Warga mempersoalkan mengapa ada pungutan untuk

Fungsi Community Center

01.

Pusat informasi warga

02.

Pusat monitoring pelayanan publik dan pengadaan

03.

Pusat advokasi / pendampingan warga

04.

Pusat pengembangan kapasitas

05.

Forum partisipasi warga dalam penganggaran

pembayaran honor petugas sekolah yang menurut warga mestinya dibiayai oleh dana BOS. Mereka merujuk pada Permendikbud RI No 51 Tahun 2011 tentang "Petunjuk Teknis Penggunaan BOS dan Laporan Keuangan BOS tahun Anggaran 2012". Esoknya sekolah tersebut menghentikan pungutan.

Eksperimentasi *Community Center* juga telah mendorong para penggerak untuk lebih aktif untuk berkiprah ke dalam dan keluar seiring penerimaan warga maupun *stakeholders* lain seperti pemerintah. Kini mereka yang tadinya hanya merupakan ibu rumah tangga telah diundang pula keberbagai kegiatan untuk menyampaikan pandangan maupun masukannya terhadap proses pembangunan. Demikian pula mereka dijadikan narasumber oleh kelompok-kelompok lain, misal di kalangan ibu-ibu maupun pedagang.

Dalam rangka membangun dialog dengan anggota DPRD daerah pemilihan (Dapil) yang terkait dengan komunitas setempat, *Community Center* khususnya di komunitas Kemijen mengadakan kegiatan pertemuan antara masyarakat Kemijendi di Semarang Timur dengan anggota DPRD Kota Semarang yang berasal dari dapil setempat. Pada pertemuan tersebut telah dideklarasikan kesepakatan bersama antar masyarakat kelurahan Kemijen dengan kedua anggota DPRD tersebut, yang

pada intinya merupakan kesepakatan bersama untuk bersungguh-sungguh mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong upaya-upaya antikorupsi di Kota Semarang.

Sejenis dengan *Community Center*, di kota Balikpapan bersama dengan mitra kerjanya yaitu STABIL dan FORMAT, TI Indonesia mendorong adanya kegiatan forum rembug warga. Forum rembug warga mempunyai bentuk dan fungsi yang sama dengan *Community Center* yaitu sebagai wadah warga untuk berkumpul dan berdiskusi terkait isu-isu pembangunan dan pelayanan publik. Melalui forum rembug warga ini dibangun gerakan bersama dari warga dalam menghadapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan isu-isu pembangunan dan pelayanan publik, terutama di wilayah domisili mereka masing-masing.

Di kota Makassar dan Banjarbaru, isu-isu pendidikan dan kesehatan menghidupkan KMK menjadi forum warga yang sebenarnya. Di mana terjadi sharing informasi, penguatan pemahaman dan kemampuan, sekaligus melakukan langkah konkrit monitoring dan pendampingan.

Mewarnai Perencanaan Partisipatif

Selain melakukan audit sosial, perencanaan partisipatif juga merupakan salah satu strategi program dalam mengontrol pembangunan dan pemberdayaan warga. Selama ini banyak sekali kekurangan dalam ritual tahunan ini. Mulai dari prosesnya yang buru-buru, partisipasi yang terbatas dan *output*-nya yang tidak cukup mengakomodasi kebutuhan warga.

Atas dasar ini, program mulai dilakukan intervensi terhadap proses perencanaan partisipatif (musrembang). Dimulai dengan memperbaiki proses musrembang di tingkat warga yakni di kelurahan dan kecamatan. Pattiro Semarang misalnya, mengupayakan perbaikan Juklak-juknis (petunjuk pelaksanaan-petunjuk teknis) musrembang. Sebuah tim bersama Pattiro Semarang dan Bappeda dibentuk untuk mengubah model fasilitasi dan teknik yang dijalankan. Selama ini musrembang dikelola seperti pengarahan atau mobilisasi. Sehingga tidak ada diskusi serius dan usulan yang matang dari warga. Perubahan menjadi fasilitasi yang sebenarnya untuk memperoleh aspirasi warga terkait kebutuhan riil mereka. Bukan lagi *check list* dari orang-orang tertentu saja tanpa pembahasan.

Demikian pula pada orientasi bidang yang dibahas. Kini tidak lagi terbatas pada infrastruktur. Tapi dibuka peluang untuk bidang-bidang lain khususnya pengembangan ekonomi dan sosial – budaya. Usulan-usulan warga

yang masuk kini bisa berupa pembiayaan peningkatan skill dan kemampuan berusaha, dukungan pendidikan dan kesehatan dan seterusnya.

Proses musrembang juga diperbaiki. Sebelumnya waktu pelaksanaannya hanya 1-2 jam saja. Padahal seremoni, pengarahan saja sudah memakan porsi waktu terbesar. Dengan memperpanjang durasi pelaksanaan musrembang, pembahasan usulan warga menjadi demokratis dan hasilnya pun lebih matang.

Selain perbaikan juklak-juknis dan pengawalan proses musrembang, Pattiro Semarang juga menjalankan penguatan kapasitas fasilitator dan penguatan organisasi pengawasan usulan warga. Terkait yang pertama, Pattiro Semarang menyelenggarakan *Training of Trainer* (TOT) untuk fasilitator. Selama ini fasilitator musrembang adalah PNS yang terbiasa pada hirarki dan instruksi. Sementara musrembang merupakan forum musyawarah pihak-pihak yang setara sehingga pengelolaannya harus demokratis. TOT ini sekaligus sebagai sosialisasi dan adaptasi dari juklak-juknis baru kepada para fasilitator musrembang.

Terkait yang kedua, Pattiro Semarang menyadari bahaya usulan-usulan warga yang tidak dikawal. Mengingat usulan-usulan tersebut akan dipertemukan dengan perencanaan teknokratis yang disiapkan pemerintah dan



Foto Dokumentasi TI Indonesia

proses politik di DPR. Akibatnya, usulan warga seringkali tersingkir saat berhadapan dengan kepentingan birokrasi dan politik. Pattiwo Semarang lalu mengkonsolidasi kelompok-kelompok **Community Center** yang ada ke dalam wadah baru yang disebut KOMPAKS. Kompaks inilah yang melakukan kontrol, loby hingga demonstrasi untuk menekan pemerintah dan DPR agar usulan-usulan warga terakomodasi.

Lembaga semacam KOMPAKS juga telah ada di kota-kota lain, seperti FORMAT di Balikpapan dan FORMASI di Dharmasraya. Kedua lembaga itu telah ada sejak tahun 2008.

Bukan Hanya Angka, Tapi juga Sasarannya

Siang itu suasana rumah makan Pesta Keboen Resto Semarang gaduh benar. Baru kali ini makan di sini seperti hanya nomor dua. Yang utama adalah diskusi. Wajar saja, sebab para pentolan **Community Center** sedang mereview program dan anggaran pemerintah untuk 2013 untuk bidang Kesehatan. Kepala dinas, kepala RSUD dan para kepala puskesmas yang hadir harus pintar-pintar menjawab kritisisme warga.



Foto: Dokumentasi TI

Pattiwo Semarang dan Bappeda kota Semarang dalam tiga hari berturut-turut memang sedang memfasilitasi forum pertemuan antara komunitas dengan SKPD yang berhubungan dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk mensinkronkan usulan program dari komunitas dengan rencana kerja SKPD, yang akan dimasukkan juga dalam RKPD.

Hasilnya cukup memuaskan perwakilan masyarakat yang hadir. Misalnya saja, tidak ada lagi anggaran yang gelondongan. Tapi jelas akan menyasar ke wilayah mana dan penerimanya siapa. Juga menjadi jelas bahwa warga membutuhkan fasilitas infrastruktur maupun

layanan-layanan yang lebih prioritas dibanding yang lain. Juga ada klarifikasi atas usulan-usulan warga yang tidak mungkin dipenuhi karena berada di luar kewenangan dinas saat itu.

Forum Konsultasi semacam ini diapresiasi warga sebagai pengakuan terhadap eksistensi KOMPAKS. Keberadaan KOMPAKS mulai diperhitungkan oleh pihak

pemerintah Kota. Selain dalam forum ini, KOMPAKS juga diminta hadir untuk beberapa kegiatan pertemuan yang berkaitan dengan pembangunan kota. Beberapa masukan KOMPAKS mengenai permasalahan sosial masyarakat di kota Semarang beserta solusinya juga sudah mulai diterima oleh pihak pemerintah kota Semarang, seperti

masalah PKL, Jamkesmas, pendidikan gratis, dan sebagainya.

Dalam salah satu advokasi anggaran KOMPAKS berhasil meningkatkan alokasi budget untuk KDRT dari 900 juta menjadi 1,3 milyar pada 2012. Demikian pula santunan Jamkesmaskot meningkat dari 11 miliar menjadi 22 milyar.

Bagian .04

KAMPANYE DENGAN MEDIUM BARU

“Korupedia merupakan situs yang didedikasikan untuk mempermalukan para koruptor dengan mengabadikan nama dan kejahatan mereka di dunia maya.”

Ratna Dasahasta, redaktur Korupedia.org

Yang Muda Yang Kritis

“Fokus utama SPEAK adalah kampanye anti korupsi, oleh anak muda pada anak muda. Cara-cara yang digunakan pun khas anak muda: kreatif, positif, non-formal, dan di luar pakem kampanye anti korupsi umumnya”.

Retha Dungga, Inisiator SPEAK



Foto bersama Youth Camp yang diadakan TI. Foto dok. TI Indonesia.

Di usia 30 tahun (2010), Gayus Halomoan Tambunan menjadi koruptor terkenal di Indonesia. Bukan saja karena dikaitkan dengan *whistleblowing* Susno Duadji yang sangat kontroversial, dan besar kekayaan yang dimilikinya (Rp 25 miliar di rekeningnya plus uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan senilai 14 miliar di brankas bank atas nama istrinya), namun banyak yang menyorot betapa muda usia dan posisinya yang belum termasuk tingkat senior. Awal 2012, kejadian serupa juga muncul, Dhana Widyatmika (37 tahun), senior Gayus di STAN, kini menjadi tersangka korupsi atas kekayaan tidak wajar sebesar Rp 60 miliar yang ada dalam rekeningnya. Seperti Gayus, posisi Dhana masih dianggap belum terlalu tinggi. Kejadian ini membalikkan anggapan umum tentang korupsi yang biasanya dilakukan oleh pejabat tinggi saja, yang umumnya sudah senior. Perilaku koruptif diserap dan ditiru oleh angkatan kerja tingkat menengah, dan bukan tidak mungkin juga menular pada angkatan kerja baru. Bukan saja di instansi perpajakan, koruptor muda Muhammad Nazaruddin (33 tahun) yang terlibat dalam kasus korupsi pembangunan wisma Atlet di Palembang juga menarik perhatian masyarakat. Di usianya yang masih muda, Nazaruddin telah menjadi komisaris di berbagai perusahaan dan menjadi bendahara Partai Demokrat.

Kasus-kasus di atas menunjukkan telah terjadi proses pembiakan koruptor baru. Generasi angkatan usia 30-40an yang diharapkan dapat merombak dan menjalankan sistem pemerintahan dengan bersih, kini sudah

tercemar. Untuk itu perlu strategi alternatif dalam menyipakan generasi selanjutnya. Strategi tersebut mencakup menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih kreatif dalam pendidikan politik berbasis empati, juga dorongan yang lebih tegas untuk aksi nyata di lingkungan sekitar saat ini, maupun saat menjadi generasi pengganti yang lebih berkualitas, berintegritas.

Keberadaan Club SPEAK dan aktivitas *youth engagement* di TI Indonesia sedikit banyak mencoba menanamkan nilai-nilai integritas kepada kaum muda. Pendekatan yang digunakan memperhatikan beberapa aspek berikut:

1. Penerjemahan ulang konsep youth citizenship dan peran politik anak muda, penajaman pada warning tentang korupsi yang merusak esensi trust dalam demokrasi.
2. Memperbaiki cara mendidik kaum muda dengan menciptakan kembali model komunikasi dalam kelas



agar bisa lebih kreatif dan relevan dengan kondisi nyata.

3. Menggunakan cara-cara mengasah empati.

4. Pendekatan pop culture penting! Dikemas ringan, menghibur, tapi smart bisa mengedukasi.

Meskipun banyak anak muda yang skeptis, bukan berarti tidak ada anak muda yang menjauh dari gerakan anti korupsi. Dengan pendekatan yang tepat, anak muda bisa betul-betul menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing dengan lebih konkret. Sebagai perubahan strategi organisasi (Indonesia), sejak 2010 TI Indonesia mulai memperluas jaringannya pada anak muda, khususnya di Jakarta. Pada Juli 2010, TI memfasilitasi pembentukan kelompok anak muda berusia 15-25 tahun membentuk Suara Pemuda Anti Korupsi

Sesi diskusi acara Youth camp (2011).
Foto dok. TI Indonesia.

(SPEAK, atau dikenal juga dengan club SPEAK). Dimulai dari serangkaian FGD Sekolah Menengah dan Mahasiswa, embrio komunitas ini pun mengkristal pada keinginan mengaktualisasikan aspirasi kaum muda untuk melawan korupsi dengan cara-cara yang lebih mudah diterima dan disebarluaskan oleh kaum muda sendiri.

SPEAK sangat aktif menggunakan alat-alat media sosial seperti twitter dan facebook. Per 24 Oktober 2012, jika dikombinasikan lebih dari 6800 pendukung dari seluruh Indonesia (per 12 Juni 2011 hanya sekitar 2200 pendukung). Dengan *trend* dukungan yang terus naik, SPEAK optimis bahwa gerakan ini akan bergulir dengan luas selama dirawat dengan intens dan konsisten.

Di antara pendukung yang telah berinteraksi langsung, yaitu kelompok anak muda yang dibina oleh Towards Transparency dari Vietnam. Dalam kegiatan workshop terjadi pertukaran pandangan dan proses pembelajaran tentang bagaimana menyikapi korupsi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, SPEAK sangat diperhatikan sebagai gerakan anak muda yang sedang berkembang dan menjadi inspirasi bagi banyak kelompok gerakan anak muda lainnya. Karena pendekatannya yang unik, yang membumikan bahasa gerakan anti korupsi menjadi dekat dengan anak muda, SPEAK mendapat undangan untuk menginspirasi dalam acara seperti Pecha Kucha. SPEAK juga diundang menjadi anggota dalam Global Youth Anti-Corruption Forum yang diinisiasi oleh World Bank Institute dan Global Changemakers yang diinisiasi oleh British Council. Selain itu banyak pula permintaan dari berbagai kota di Indonesia tentang pembentukan SPEAK, baik yang muncul dari individu maupun NGO yang memang memiliki ketertarikan untuk mengembangkan potensi anak muda.

Usia SPEAK sekarang lebih dari 2 tahun. Selain melakukan kampanye lewat konser musik dan diskusi bulanan, anggota aktifnya juga mengembangkan kegiatan-kegiatan lain yang mampu lebih memberi dampak perubahan langsung. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

A. SPEAK Goes to School.



Suasana SPEAK goes to school di SMU Gonzaga Jakarta. Foto dok. TI Indonesia.

Mereka penting untuk didukung keberadaannya karena sangat strategis dalam membantu penerapan prinsip anti korupsi di sekolah. Penerapan tidak hanya secara pengetahuan, tetapi juga secara teknis, sehingga siswa dapat lebih terlatih dan kebal terhadap korupsi. Karena seperti yang telah diketahui, praktek langsung jauh lebih efektif daripada sekedar penggugahan. Mengingat keterbatasan kemampuan siswa SMA/SMK untuk menerapkan hal ini secara utuh dan mendalam, bahan yang akan digunakan disesuaikan agar dapat dikonsumsi tanpa mengurangi nilai-nilai penting. Dua landasan yang akan berjalan berkesinambungan. Pertama,

ciptaan iklim anti korupsi bagi siswa sekaligus peningkatan kemampuan pengurus OSIS dalam implementasi. Kedua, menciptakan jaringan antar pengurus OSIS sehingga dapat saling mendukung dan memperluas pengaruh. Langkah pertama dilakukan dengan memberikan pelatihan pelaporan kegiatan bagi anggota OSIS seko-



lah, dilanjutkan dengan pendampingan saat implementasi. Langkah kedua dilakukan dengan mengumpulkan kelompok OSIS yang berpartisipasi dalam program ini dan mengajak mereka mendeklarasikan identitas kolektif. Program sudah berlangsung dan saat ini ada 2 sekolah yang didampingi aktif oleh anggota SPEAK.

B. SPEAK Institute



Suasana SPEAK goes to school di SMU Gonzaga Jakarta. Foto dok. TI Indonesia.

Merupakan program yang didisain bagi anak muda (di luar organisasi formal) yang tertarik untuk mendalami isu korupsi lebih jauh. Model pembelajaran lebih pada diskusi interaktif dan diarahkan untuk menciptakan gagasan konkret tentang aksi nyata. Program ini adalah respon evaluasi AksiKita yang dijalankan selama 6 bulan di 2011, yaitu perlu adanya tahapan pemahaman isu korupsi secara lebih mendasar agar lebih banyak peserta yang mampu menerjemahkan solusi untuk masalah. Alur di bawah ini masih dalam tahap pengembangan modul dan alat penunjang belajar berupa video.

No	Alur	Tujuan	Perkiraan Waktu	
1	Problem-Solver Essai	Alat outreach, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang korupsi dan perspektif perubahan sosial.	Minggu 1 - 4	Dua Bulanan
2	Seminar & Focus Group Discussion	Memperluas pengetahuan tentang korupsi	Minggu 5	
3	Panel Discussion on Action Idea	Mempertajam analisis terhadap masalah korupsi yang ingin diselesaikan	Minggu 6	
4	SPEAK Training	Mengembangkan kemampuan praktis untuk memulai dan mengembangkan inisiatif	Minggu 7	
5	Aksi Kita	Workshop kreatif untuk pengembangan rencana aksi	Minggu 8	

Dalam membantu mengembangkan SPEAK selama 2 tahun, prinsip partisipasi sangat penting dalam mengelola kelompok ini. Prinsip ini berguna untuk mengembangkan aktivitas dan diskusi gagasan. Selain itu penting untuk terus memperbarui metode kreatif agar tidak terjebak dalam rutinitas penyampaian materi yang sama. Intensitas dan komitmen tinggi sangat diperlukan untuk pendampingan. Konsep dasar tentang gerakan antikorupsi dapat dikembangkan dan disampaikan kembali pada sesama anak muda dengan pendekatan gaya anak muda saat ini. Mereka sangat haus pengetahuan dan pendampingan. Keyakinan mereka terhadap gerakan ini sangat tinggi. Sebagai anak-anak kelas menengah dengan akses pendidikan tinggi, kemampuan mereka memahami permasalahan struktural di balik korupsi sangatlah potensial. Dengan bimbingan yang baik, mereka akan mampu menerjemahkan kompleksitas masalah yang ada pada sesama anak muda dan fokus pada penyelesaian masalah konkret keseharian yang lebih realistis diselesaikan.

Model pengembangan kelompok anak muda seperti SPEAK ini sangatlah potensial direplikasi di berbagai tempat di Indonesia.

C. SPEAK Forum (Youth Voters Education)

Transparency International Indonesia menginisiasi program Youth Voters Education bagi pemilih muda (17-30 tahun). Upaya mendekatkan jarak antara anak muda dengan politik menjadi salah satu tujuan dari pendidikan politik pemilih ini. Youth Voters Education meman-

faatkan momentum Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2012. Forum diskusi publik berdimensi anak muda dipilih sebagai format utama pilot project ini.



Suasana SPEAK Forum (Youth Voters Education) bersama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Kedai Tjikini. Foto dok. TI Indonesia.

Forum pertama diadakan 6 Agustus 2012, menjelang putaran pertama Pilgub DKI. Tema yang diangkat bertajuk, "Damn! We Love Jakarta". Pembicara yang hadir adalah: Narpati Awangga/ OomLeo (Ruang Rupa), Sahat Tarida (Aktivis Perempuan dan Pekerja Seni Serrum Studio), Asep Kambali (Komunitas Historia Indonesia) dan Slamet D. (Koalisi Warga Jakarta dan Aktivis Lingkungan). Diskusi membahas tentang seluk-beluk kota Jakarta, dari sisi kesejarahan, persoalan tata kota dan lingkungan, sampai dengan curah pendapat dari peserta tentang harapan untuk Jakarta. Kegiatan ini bertempat di Kedai Tjikini dan dihadiri 30 peserta.



Suasana SPEAK Forum (Youth Voters Education) mengambil tema Jakarta kita 2017 di FX senayan. Foto dok. TI Indonesia.

“Right to Vote, Right to Voice”, menjadi tema yang diangkat dalam forum diskusi kedua di Reading Room, Kemang (29/8). Tidak kurang dari 50 peserta memenuhi ruang diskusi. Hadir sebagai pembicara adalah Basuki Tjahaya Purnama/ Ahok (Cawagub DKI), Inayah Wahid (Positive Movement), Angga Dwi Sasongko (Tim Sukses Faisal-Biem), dan Irwansyah (Dosen dan Peneliti Pusat Kajian Politik UI). Diskusi kedua lebih hangat dan antusiasme peserta cukup tinggi. Mengingat, obrolan diskusi menysar pada konteks politik uang dan keterlibatan anak muda dalam pengawasan praktik kecurangan Pemilu. Diskusi menarik ini ditutup dengan penampilan dari Efek Rumah Kaca (ERK).

“Visinya, bagaimana Jakarta dibangun dengan cinta,” curah Pandu, salah satu peserta diskusi Jakarta Kita 2017. Pamungkas dari kegiatan Youth Voters Education adalah forum diskusi ketiga di FX Mall dengan tema “Jakarta Kita 2017”. Talkshow interaktif sebagai pembuka diskusi menghadirkan Faisal Basri dan Arif Zulkifli (TEMPO). Diskusi mengajak peserta muda kritis melihat persoalan di sekitar mereka dan bergerak melakukan perubahan. Sesi kedua, hadir Lola Amaria, Ernest Prakasa, dan Iman Sjafei. Masing-masing adalah generasi muda yang mengekspresikan kebebasan mereka, meskipun sekat ruang berekspresi masih menjadi isu penting bagi Jakarta. Penyampaian visi anak muda Jakarta Kita 2017 merupakan bagian terpenting forum diskusi ketiga ini. Setidaknya ada tujuh isu utama yang menjadi pemenuhan harapan ideal bagi anak muda. Transportasi, ruang publik, sarana olahraga, pusat kegiatan anak muda, re-

vitalisasi situs sejarah, keamanan kota dan kebersihan. Visi ini diperoleh lewat proses FGD di TII, yang merupakan rangkaian program Youth Voters Education. Diskusi hangat ini dihadiri 100 peserta dan didukung oleh Provocative Proactive dan PoliticaWave. Forum ini ditutup penampilan musik dari Tika and The Dissidents.



Suasana SPEAK Forum (Youth Voters Education) bersama di Kedai Tjikini, bersama Narpati Awangga/ OomLeo (Ruang Rupa), Sahat Tarida (Aktivis Perempuan dan Pekerja Seni Serrum Studio), Asep Kambali (Komunitas Historia Indonesia) dan Slamet D. (Koalisi Warga Jakarta dan Aktivis Lingkungan). Foto dok. TI Indonesia.



Foto-foto Suara pemuda anti korupsi Festival (SPEAK FEST).
Foto dok. TI Indonesia.



D. SPEAKFEST

Merupakan upaya untuk mengajak anak muda menyuarakan emosinya tentang korupsi lewat musik, video, street-art, dan teater. Video (dengan subtitle bahasa inggris) : http://youtu.be/KG9LNj_CE



Inisiatif Lain: Aksi Kita

Aksi Kita (anti-corruption online independent learning: <http://aksikita.clubSpeak.org>) merupakan platform yang membantu munculnya generasi baru Indonesia yang berinisiatif mandiri menyelesaikan korupsi yang ada di lingkup sekitarnya, saling berjejaring dan menguatkan. Anak muda yang menjadi inspirasi bagi banyak anak muda lain, mendorong terciptanya lebih banyak lagi inisiatif antikorupsi yang lebih segar, kreatif, dan ramah dipahami anak muda.

Konsep workshop dipindahkan ke dalam bentuk video tutorial model graphic recording. Video terdiri dari 5 bagian (Intro, Discovery, Social Issue, Visi Perubahan, dan Langkah Praktis Menciptakan Aksi AntiKorupsi) sehingga tercipta serial video workshop yang bisa diakses di web clubSpeak.org. Selain itu video dilengkapi dengan modul sebagai alat bantu belajar. Modul dapat diunduh setelah pengakses memberikan datanya agar dapat dipantau. Pengguna web clubSpeak.org juga bisa request pengiriman modul AksiKita dilengkapi dengan CD video dan pernik-pernik clubSpeak dengan biaya tertentu. Selama masa pemantauan, pengguna modul dipilih yang telah menjalankan aksi sosialnya dengan nyata. Yang terpilih mendapat akses mengikuti workshop AksiKita difasilitasi oleh clubSpeak langsung, dan mendapat akses juga untuk konsultasi dengan young change makers yang telah melewati fase start-up agar mendapat masukan lebih konkrit terkait usaha sosialnya tersebut.



Susana kegiatan AKSI KITA yang dimotori oleh youth department TI Indonesia. | Foto dok. TI Indonesia.



Susana kegiatan AKSI KITA yang dimotori oleh youth department TI Indonesia. | Foto dok. TI Indonesia.



Video Animasi "Suara Pemuda Anti Korupsi" Aksi Kita. Foto dok. TI Indonesia. |

ICT dan Media Kreatif Baru



Juara ke 3 Hackathon yang diselenggarakan oleh TI Indonesia (2012).
Foto dok. TI Indonesia.



Samantha grant (TI Berlin menyerahkan hadiah kepada juara 1 hackathon yang diadakan TI Indonesia (2012). Foto dok. TI Indonesia.

Teknologi komunikasi dan informasi telah menjadi bahasa baru bagi perubahan. Perkembangan internet, gadget, dan media sosial tidak lagi sekadar mentransmisi pengetahuan dan informasi, tetapi telah menjadi instrumen utama bagi perubahan-perubahan. Di lain pihak semakin kuatnya pop culture di kalangan kaum muda dan kelas menengah membuka tantangan baru bagi pemanfaatan medium-medium kreatif seperti film, animasi dan musik untuk menyampaikan pesan perubahan. Para penggiat antikorupsi harus pula menguasai perkembangan baru ini jika tidak ingin kehilangan kendali melalui media baru perubahan ini.

TI Indonesia memulai prakarsa penggunaan ICT sebagai sarana baru kampanye antikorupsi. Dimulai dengan pembuatan film-film dokumenter, cerita dan animasi yang menyoroti persoalan integritas dan partisipasi publik. Film ini memperlihatkan perjuangan warga di Kemijen dalam mengekspose temuan-temuan mereka. Setelah mengekspose sejumlah LSM, media dan anggota DPR, komunitas Kemijen berhasil menekan kontraktor dan Dinas Tata Kota untuk memperbaiki

pengadaan MCK umum sesuai standar yang diharapkan.

Film dokumenter Kemijen Bergerak yang diproduksi bersama Ragam Media Network telah memperoleh sambutan luar biasa. Dalam peluncuran dan *road show* nya di Sema-

Beberapa permintaan pemutaran terus berdatangan dari Ambon, Sulawesi dan kota-kota lainnya. Sejumlah aktivis menganggapnya dapat menjadi rujukan model audit sosial pemantauan barang jasa di tingkatan warga.



Pemutaran dan diskusi film *Kita versus Korupsi (KvsK)* bersama 500 kepala sekolah SMU se Indonesia. Foto Dok.TI Indonesia.

rang, Batang dan Pontianak, film yang bercerita tentang community-based effort dalam memantau dan melalui metode audit sosial ini, telah menjadi bahan diskusi antara kepala daerah, birokrasi dan warga.

Selain itu TII atas dukungan Danida telah mendorong diskusi-diskusi lebih intensif antara film maker dan aktivis antikorupsi. Hasilnya sebuah rancangan insiatif kampanye antikorupsi melalui film cerita layar lebar dan animasi. Cikal-bakal film



Nonton bersama film "Kemijen Bergerak" bersama Walikota Pontianak. Foto dok. TI Indonesia.



Penyerahan DVD film dokumenter "Kemijen Bergerak" oleh TII ke Pemerintah Kota Makassar. Foto dok. TI Indonesia.

cerita Kita versus Korupsi yang kemudian didanai lebih lanjut oleh MSI dan USAID muncul dari sejumlah diskusi tersebut. Film ini kemudian ditonton lebih dari 9 juta melalui layar lebar, **public screening**, TV dan internet. Sebentar lagi film-film animasi yang diproduksi sebagai tutorial isu korupsi akan dilaunching pula untuk target pemirsa kaum muda.

Dalam semangat yang sama TI Indonesia menggandeng sejumlah hackers untuk mendukung pemberantasan korupsi. Pada Juli 2012, atas prakarsa sejumlah aktivis antikorupsi dan **hackers** Korupedia.org di-**launching** dan memperoleh apresiasi yang sangat luas. Hanya dalam beberapa hari, jutaan orang dari dalam dan luar negeri mengunjungi situs ini. Situs ini memang berisikan nama pelaku korupsi dan kasusnya sehingga orang tidak lagi lupa. Selain itu, kasus-kasus yang macet juga disajikan untuk mendorong penanganan lebih lanjut.

Pada awal Oktober ini, TI Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan HAC (Hack Against Corruption) di Jakarta. Diselenggarakan serentak bersama 4 kota lain pada 6-7 Oktober, lima tim hackers berhasil menghasilkan 5 aplikasi antikorupsi. Aplikasi tersebut mencakup aplikasi mobile untuk perilaku suap dijalan, pelaporan dan rating pelayanan kesehatan, monitoring proses peradilan, monitoring proses pemilu dan hingga aplikasi complain handling pelayanan publik. Hasil-hasil aplikasi tersebut selain untuk menjawab kebutuhan spesifik dari problem korupsi yang diajukan peserta dari 7 negara di Asia, juga bisa dikembangkan dalam sektor. Dengan basis open sources, aplikasi ini akan mudah pula diadaptasi ke dalam konteks lokal berbagai negara.



Foto bersama peserta dan panitia Hackathon (2012). Foto dok. TI Indonesia. |



korupedia

Ensiklopedia Korupsi Indonesia

www.korupedia.org

Korupedia.org:

Sangsi Baru bagi Koruptor

Tak ada yg menafikan pentingnya penegakan hukum untuk mengurangi praktik korupsi. Namun, sanksi sosial kadang-kadang jauh lebih efektif. Pemahaman tersebut menginspirasi pembuatan www.korupedia.org, situs online pertama tentang koruptor di Indonesia. Diprakarsai oleh tokoh-tokoh antikorupsi dan wartawan terkemuka, situs ini diluncurkan di Warung Daun, Jakarta pada 12 Juni.

Korupedia kini dipuji sebagai cara kreatif untuk memperlakukan narapidana korupsi. Harapannya upaya ini akan membersihkan keraguan bagi siapa pun untuk melakukan perbuatan keji seperti korupsi.

Korupedia menyajikan daftar koruptor, identitas dan deskripsi singkat tentang kasus pelaku korupsi. Dengan demikian publik dapat mengetahui dan tidak melupakan kejahatan mereka terhadap bangsa ini.

Data Korupedia didasarkan pada dokumen putusan yang berkaitan dengan koruptor, dan telah menjadi putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dokumen tersebut bisa jadi putusan yang dikuatkan oleh pengadilan di tingkat banding, Mahkamah Agung, atau dari pengadilan yang lebih rendah yang tidak lagi ditindaklanjuti ke pengadilan yang lebih tinggi.

“Bangsa ini sangat mudah lupa dan memaafkan. Kadang-kadang kita saksikan koruptor dipuja-puji di komunitas mereka tidak lama setelah dibebaskan dari penjara. Beberapa bahkan mencalonkan diri sebagai

wakil rakyat atau dilantik sebagai bupati/gubernur saat masih di penjara,” prihatin Teten Masduki dari Transparency International Indonesia yang merupakan salah satu inisiator Korupedia.

Situs ini awalnya juga dirancang untuk menyediakan informasi kasus yang proses hukumnya terhenti. Dengan melihat lamanya status penanganan kasus, Korupedia dapat menginfokan dan mendorong penanganan kasus yang macet.

Sebagai alat advokasi, Korupedia bisa berfungsi untuk memantau proses hukum kasus korupsi dari ketika mereka mulai, sampai status mereka saat ini. Sehingga gerakan antikorupsi bisa mendorong dan mengawal kasus-kasus tersebut.

Bagi masyarakat, Korupedia dapat menjadi pusat informasi yang berguna untuk memperingatkan mereka tentang risiko berurusan dengan koruptor. Daftar ini antara lain sangat berguna bagi publik ketika mereka memilih wakil dan pemimpin mereka dalam pemilu. Dengan demikian Korupedia dapat mengakhiri karier politik narapidana korupsi.

Korupedia sudah mendata 100 koruptor pada saat peluncurannya. Situs ini akan berkembang pesat berkat dukungan banyak pihak. KPK, misalnya berkomitmen untuk memberikan informasi lebih lanjut dari database mereka.



"Tanpa perlu diminta, KPK dapat memberikan daftar informasi. Tidak ada koruptor yang bebas setelah proses hukum berjalan." kata Busyro Muqoddas, komisioner KPK pada peluncuran Korupedia.

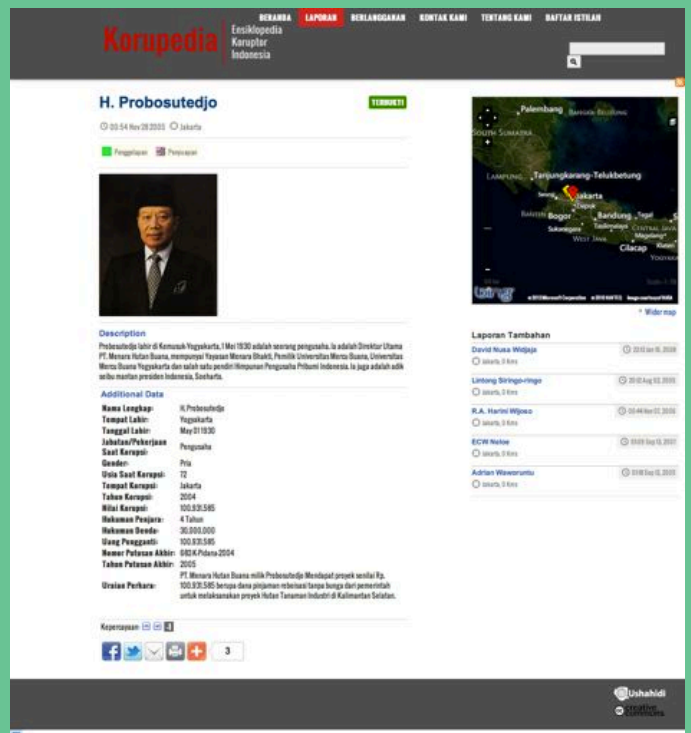
"Korupedia bisa mendukung metode kreatif dan dan mencerahkan untuk memerangi korupsi," lanjutnya dengan mantap.

Bukan hanya pesohor seperti Gayus Tambunan, Artalyta Suryani atau mantan Bupati Subang Eep Hidayat yang ditayangkan di website ini. Situs ini juga daftar koruptor yang minim liputan media atau mereka yang tinggal juaah terpendil. Dengan demikian, publik memperoleh akses informasi tentang koruptor kelas teri dan Korupedia membantu masyarakat menghindari manipulasi di daerahnya.

Heru Hendratmoko, pemimpin redaksi Radio 68H dan salah satu pendiri Korupedia, menambahkan bahwa "kami membangun monumen peringatan virtual untuk memperlakukan koruptor. Jika bangsa ini memperingati mereka yang berdedikasi dan membela negara ini, kini kita tidak lupa siapa saja yang telah meruntuhkan negeri ini."

Akhirnya, inisiatif Korupedia adalah contoh lain dari kolaborasi anti-korupsi oleh masyarakat sipil. Upaya ini melanjutkan kampanye film Kita versus Korupsi (KvsK) yang diluncurkan pada awal 2012. Korupedia dan KvsK menjadi cara baru yang kreatif untuk menjadikan ko-

rupsi sebagai perbuatan yang sangat berisiko dibanding hasilnya.



Tampilan dasar situs www.korupedia.org. Foto dok. TI Indonesia.

Penutup

Perlawanan terhadap korupsi telah berkembang pesat sejak reformasi berjalan. Upaya-upaya tersebut telah menunjukkan sejumlah keberhasilannya dan telah menjadi daya dorong untuk kerja-kerja gerakan lebih lanjut.

Pengalaman bekerjasama dalam program *Good Governance and Anti-Corruption* yang didukung oleh DANIDA selama 7 tahun ikut berkontribusi dalam mengubah persepsi bahwa kini korupsi bisa dilawan dan dapat diberantas. Beberapa cerita tentang kepeloporan pemimpin politik seperti di Makassar, Batang, Pontianak dan tempat lain dapat dilihat sebagai peluang-peluang besar bagi perubahan. Kekuatan konkret masyarakat sipil yang terbentuk dalam komunitas-komunitas gerakan seperti di Semarang, Makassar, Banjarbaru, Balikpapan dan Pontianak juga telah menurunkan gerakan ini ke publik, dan bukan lagi terbatas sebagai kerja-kerja elit pemerintahan saja. Sistem antikorupsi yang dilembagakan dalam Pakta Integritas sebagai kontrak sosial dan mekanisme kontrol warga, kini telah berjalan dengan eksponen-eksponen warga diakui keberadaannya dan LPI yang buy-in ke dalam sebagai lembaga quasi-state di daerah.

Penglibatan *privat sector* dalam bentuk collective action dengan PLN dan vendor-vendornya merupakan langkah maju di sektor ini. Korupsi telah dilihat sebagai resiko bisnis yang berbahaya versus keuntungan yang bisa dicapai perusahaan-perusahaan.

Di lain pihak, kampanye antikorupsi dan penggalangan kelompok kaum muda kini mencapai level baru. Sarana multi media, seperti film, animasi, komik, website interaktif dan media sosial telah digunakan secara kreatif untuk menjangkau lebih banyak lagi pendukung antikorupsi. Pendekatan kreatif baru seperti stand up comedy, pentas musik, workshop berfikir positif, kampanye streetart, dan teater telah menjadi komplementer dengan konferensi pers, advokasi UU dan kegiatan kampanye konvensional.

Kisah-kisah yang terangkum dalam buku ini semoga memberi kita motivasi lebih dan inspirasi yang kaya bagi Indonesia bebas korupsi bagi anak cucu kita.



DANIDA



Buku ini merupakan kompilasi dari kisah-kisah singkat dari program Good Governance and Anti-Corruption. Di dalamnya TI Indonesia bersama-sama dengan berbagai mitra lokal mengembangkan pendekatan antikorupsi yang diinspirasi oleh peran penting penglibatan masyarakat sipil dalam upaya-upaya melawan korupsi. Masyarakat sipil di sini dilihat sebagai aktor utama, baik sebagai penerima manfaat maupun pemicu dan fasilitator bagi berkembangnya sistem antikorupsi di lembaga pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian tercapai manfaat pembangunan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik dan level kemerdekaan warga itu sendiri dalam mengaktualisasikan partisipasi politiknya sehari-hari.